

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL ANGKUTAN
BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2008 TENTANG PELAYARAN PADA PERAIRAN SELAT RENGIT
DESA SEMUKUT-SIALANG PASUNG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

BAHRUL HAYAT
NIM. 11627104131

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti”* yang ditulis oleh:

Nama : BAHRUL HAYAT

NIM : 11627104131

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Rajab 1441 H
17 Maret 2020 M

Pembimbing Skripsi

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.
NIP. 19590711199503 2 001

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL ANGKUTAN
BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2008 TENTANG PELAYARAN PADA PERAIRAN SELAT RENGIT DESA
SEMUKUT-SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

: **BAHRUL HAYAT**
: 11627104131
: ILMU HUKUM

: Dimunaqasyahkan pada :
: Hari / Tanggal : Senin / 27 April 2020
: Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



Dr. H. Maghfirah, MA
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

Muslihah, SH., MH.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Firdausy, SH., MH.
(Anggota Penguji)

4. Muslih, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas terkait kelaiklautan sebuah kapal dalam pelayaran, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, yakni masih banyaknya terdapat kapal-kapal khususnya yang berbahan dasar kayu yang belum memenuhi kriteria standar kelayakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini tentunya untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap kelayakan sebuah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta bentuk tanggung jawab didalam pengangkutan melalui kapal motor. Penelitian ini berlokasi di pelabuhan penghubung desa Semukut, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di mana terdapat 5 (Lima) pemilik kapal yang memberikan jasa pengangkutan barang. Penulis mengumpulkan data berdasarkan pengamatan (*Observation*), wawancara (*Interview*), dan studi dokumen.

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil sebuah hasil bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah mensyaratkan terhadap kapal yang dinyatakan laik laut, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kemudian terkait dengan tanggung jawab pengangkutan laut sebagaimana yang dipertegas dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yakni perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kapal-kapal kayu di pelabuhan penghubung desa Semukut dapat dinyatakan tidak laik laut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

Ayahanda Ramli dan Ibunda Zainabun yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, yakni: abang M. Adeli, akak Siti Rahmah, akak Rumaishah, dan abang Ahmad Sukri serta keluarga besar penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.

Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Ketua Jurusan Ilmu Hukum, bapak Firdaus, SH., MH, dan sekretaris jurusan, bapak Muslim, S.Ag., M.Hum., serta jajarannya.

5. Kepada Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH, selaku dosen favorit penulis, karena dalam proses belajar-mengajar bawaannya selalu membuat humoris di dalam lokal. Serta beliau juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH., MH, selaku dosen penasehat akademis dari awal semester sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.

Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

Kepada teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ilmu Hukum-B 2016 dan Ilmu Hukum Bisnis-A yang sama-sama mengarungi bahtera pendidikan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampus UIN SUSKA RIAU. Serta rekan-rekan PKL PTA. Pekanbaru 2018 dan KKN USR 2019 Desa Melayu Besar Kota.

Kepada sahabat karib penulis, Reza Syaiendra Yusni, Deni Ilham, Juni Saputra, Azizan Syah yang telah sudi menjadi bagian dari perjalanan kehidupan penulis dalam menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA RIAU.

Dan kepada saudara M. Khairy Dzaky, M. Anshori, Randi Maydani, Hery Juanda, Saiful Dinata, Suparlan Antonio, Suhaimi, yang telah sudi menjadi teman canda dan tawa penulis, serta seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis menghaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca. *Amin ya rabbal alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Maret 2020

BAHRUL HAYAT
NIM. 11627104131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Semukut.....	16
B. Geografis dan Demografis	18
C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	20
D. Sosial Ekonomi Masyarakat	23
E. Adat Istiadat	25

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Kegiatan Pelayaran	27
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsep Teoritis Kelayaklautan	31
C. Tinjauan Teoritis Pengangkutan	34
D. Kapal Sebagai Sarana Transportasi Laut	39

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti.....	52
B. Bentuk Tanggung Jawab Di Dalam Pengangkutan Barang Melalui Kapal Motor	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	12
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Usia	19
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.4	Jumlah Sarana Pendidikan.....	21
Tabel 2.5	Jumlah Penganut Agama	22
Tabel 2.6	Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-Masing Agama.....	23
Tabel 2.7	Jenis Mata Pencaharian	24
Tabel 4.1	Daftar Nama dan Ukuran Kapal.....	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia oleh karenanya disebut sebagai Nusantara.¹ Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 1 angka 1 yaitu: “Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Dan dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 2 bahwa: “Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan berada diatas permukaan air pada waktu air pasang”.²

Banyaknya pulau-pulau di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki keunikan tersendiri, dimana tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui daratan atau melalui transportasi udara, sehingga satu-satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pulau tersebut harus menggunakan transportasi laut.³ Seperti halnya dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti terletak di Provinsi Riau bagian pesisir yang terdiri dari 3 (tiga) pulau, yaitu: Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi. Di mana

¹ Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017: h. 57-76.

² Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

³ *Op. Cit.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua akses kegiatannya baik di dalam bidang agama, sosial, dan budaya, terutama dalam bidang ekonomi tidak efisien di karenakan masyarakat harus melewati daerah perairan dari pulau yang satu dengan lainnya. Untuk itu, alternatif satu-satunya adalah masyarakat harus menggunakan jasa transportasi pengangkutan laut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan bahwa: “Pengangkutan laut merupakan suatu kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.”⁴

Mengenai definisi kapal dapat di jumpai dalam Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”⁵

Pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi negara Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:⁶

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya;

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁶ R.Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.

Ada empat macam penyelenggaraan pengangkutan laut, baik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Keempat jenis pengangkutan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pelayaran dalam negeri yaitu kegiatan angkutan laut antarpelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri ini dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh badan hukum Indonesia dalam keadaan tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor sesuai dengan persyaratan di antaranya:
 - a. Dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha, termasuk koperasi;
 - b. Memiliki unit perahu layar atau kapal layar motor dengan ukuran sampai dengan 850 m³ isi kotor atau kapal motor dengan ukuran sampai dengan 100 m³.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelayaran perintis yaitu pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
4. Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran tidak tetap dan tidak dengan menggunakan semua jenis kapal.⁷

Pengangkutan laut di Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong ke dalam jenis pelayaran rakyat. Pelayaran-Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.⁸

Sejauh ini kapal yang terbuat dari bahan dasar kayu menjadi moda transportasi alternatif bagi masyarakat desa Semukut khususnya. Lazimnya, dalam kegiatan kesehari-harian kapal ini membawa barang hasil panen karet masyarakat yang berupa “ojol” yang akan di distribusikan ketempat penampungan atau para pembeli hasil karet yang berada di pulau seberang. Salah

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. ke-10, h. 166-168.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran_rakyat. Di akses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁹ Ojol merupakan sebutan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya, terhadap hasil panen karet yang di garap dari pohonnya dan di kumpulan dalam sebuah cetakan yang berupa ember.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya adalah pulau rangsang, tepatnya di desa Sialang Pasung. Dengan kata lain, masyarakat diharuskan menggunakan kapal ini dalam perdistribusian barang tersebut. Jarak tempuh kapal ini menuju desa Sialang Pasung memakan waktu kurang lebih 2 (dua) jam.

Terdapat beberapa kapal di pelabuhan penghubung desa Semukut yang khusus memberikan jasa transportasi pengangkutan barang. Kapal angkutan barang ini dilakukan dan dikelola oleh perseorangan, yakni masyarakat desa Semukut itu sendiri. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya kapal atau perahu ini karena sebagai penunjang dari perekonomiannya.

Sebagai kapal yang memberikan jasa angkutan barang terhadap masyarakat, tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap suatu kelaiklautan kapal, menyebutkan bahwa:

“Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”¹⁰

Dari penjelasan kelaiklautan kapal diatas, terdapat beberapa kapal di pelabuhan penghubung desa Semukut yang bertolak belakang dengan ketentuan dari kelaiklautan kapal tersebut. Hal ini ditandai dengan ketidakpunyaan

¹⁰ Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen resmi dari pihak kesyahbandaraan kabupaten selaku pihak yang berwenang dalam aktivitas pelayaran. Seperti tidak adanya surat pas kecil, surat keselamatan kapal, serta kondisi kapal tersebut yang tidak dilakukan perawatan dan perbaikan.

Kemudian, bila di perhatikan pada substansi pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha harus memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari para pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹¹

Selain itu pengelola jasa pengangkutan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti pengangkutan dapat dilaksanakan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain, atas perintah pengangkut. Istilah “dengan selamat” berarti pengangkutan yang tidak selamat akan menjadi tanggung jawab pengangkut, sehingga pengangkut harus membayar ganti rugi atau membayar santunan terhadap penumpang.

Pengangkut yang menyediakan jasa pengangkutan harus memiliki komitmen dengan apa yang ditawarkan, sesuai dengan ongkos angkut yang

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. ke-2, h. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimintanya, dan tetap memegang asas-asas perjanjian pengangkutan serta tujuan pengangkutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, tertib, teratur, nyaman dan berdaya guna dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.¹²

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian: **“Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis membatasi terhadap kapal/perahu yang khusus memberikan jasa angkutan barang di pelabuhan penghubung desa Semukut, Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹² Djafar Al Bram, *Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku I): Pengertian, Asas-Asas, Hak Dan Kewajiban Para Pihak*, (Jakarta: PKIH FHUP, 2011), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kelayakan kapal angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada perairan selat rengit desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab di dalam pengangkutan barang melalui kapal motor?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dari tinjauan hukum terhadap kelayakan kapal angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada perairan selat rengit desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab di dalam pengangkutan barang melalui kapal motor.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis khususnya yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2008 tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Untuk menambah daftar literatur bacaan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan menambah minat pembaca dalam ilmu pengetahuan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1981), h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian, atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁵

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

¹⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶ Dalam hal ini adalah pemilik jasa angkutan barang dan pihak kesyahbandaraan kabupaten dengan metode observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemilik kapal yang memberikan jasa angkutan bagi masyarakat atau konsumen. Di mana terdapat 5 (lima) orang pemilik kapal yang berada di pelabuhan penghubung desa Semukut dan sering digunakan sebagai jasa pengangkutan barang.

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Namun, karena jumlah populasi yang bisa dijangkau oleh peneliti, maka peneliti mengambil semua populasi tersebut yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO.	Subyek Yang Di Teliti	Jumlah	Persentase(%)
1.	Pemilik Kapal	5 Orang	83%
2.	Syahbandar Kab. Kep. Meranti	1 Orang	17%
Total		6 Orang	100%

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kepada:

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁷

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian yang akan peneliti teliti ini antara lain:

- a. Deduktif, yang menyimpulkan dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang ada kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari: sejarah singkat desa Semukut, geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, serta adat istiadat.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Menerangkan tentang kosep tinjauan teoritis tentang kegiatan pelayaran, tinjauan teoritis pengangkutan, dan kapal sebagai sarana transportasi laut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan terkait hasil penelitian, yang meliputi: tinjauan hukum terhadap kelayakan kapal angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada perairan selat rengit desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti, serta bentuk tanggung jawab di dalam pengangkutan barang melalui kapal motor.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Singkat Desa Semukut

Semukut adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dimana penduduk potensialnya (umur 17 tahun keatas) 2000 jiwa lebih pada tahun 2010. Semukut mempunyai sejarah yang panjang dengan kehidupan religi masyarakatnya yang sangat patuh terhadap sang guru. Sang guru disini adalah; pertama oleh KH. Affandi (wafat tahun 1960) dengan gelar Syekh Indragiri, kemudian oleh KH. Mufti (wafat tahun 1980) kemudian dilanjutkan oleh KH. Syarifuddin (wafat tahun 2006).¹⁸

Kata semukut berawal dari kelompok nelayan yang mengatakan “semua ikut”. Awal ceritanya adalah ketika masa dahulu banyak nelayan dari penjuru Meranti yang berlayar mencari ikan di daerah Tanjung Kongkong yang berada di Pulau Merbau tepatnya dulu disebut Kerajaan Merbau, dimana Tanjung Kongkong tersebut berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Ketika mereka akan beristirahat dari bernelayan, salah satu dari mereka mengajak teman-temannya dengan kata yuk "semue ikut", lalu yang paling belakang dari mereka mendengar sebatas semukut, lalu lama kelamaan orang tersebut tanpa disadari setiap orang bertanya mau kemana pasti dia menjawab ke Semukut dan tanpa

¹⁸ [www.http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-semukut.html](http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-semukut.html). Di akses pada tanggal 14 Januari 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sadar orang tersebut memberikan nama daratan tersebut dengan sebutan "Semukut". Maka demikian setelah banyak orang yang beristirahat disana dan lama-kelamaan menetap disana dan membuat kebun disana lalu jadilah kampung semukut dan sekarang menjadi desa Semukut.¹⁹

Semukut masa dahulu terletak di ujung sungai semukut yang berdekatan dengan dusun juling dan dusun kayu ara, tetapi saat ini Semukut tersebut sudah ditinggalkan orang, kini hanya hamparan tanah yang berisikan tumbuh-tumbuhan sejenis bakau atau mangrove. Setelah semukut menjadi ramai banyaklah pemukiman penduduk yang menyebar di kawasan desa semukut tersebut, sehingga terbentuklah kawasan seperti Juling, Kayu Ara, Parit Mesjid, Belokop, Parit Baru, Menawah, Wonodadi, Mempalai, Belukang, dan Cemaning. Kesemuanya itu adalah nama-nama daerah yang ada di desa Semukut.

Pada masa penjajahan Belanda, Semukut hanya sebuah dusun atau pedukuhan, kemudian pada masa penjajahan Jepang Semukut telah menampilkan wajah sebuah desa yang ramai, karena banyak tokoh-tokoh Islam yang berdatangan ke semukut untuk mengembangkan ajaran agama Islam, seperti KH. Imam Affandi.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka secara otomatis Semukut menjadi sebuah Desa yang diakui oleh pemerintahan Indonesia dibawah karesidenan Selatpanjang, ketika itu dibawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moch. Hatta, dimana Penghulu atau Kepala Desanya yang

¹⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama adalah Cik Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh Cik Mail selama lebih kurang 18 tahun kemudian dilanjutkan oleh E. Ramli selama lebih kurang 20 tahun, dan Abdul Razak selama 10 tahun dan di lanjut oleh Saipul 6 Tahun dan sampai saat ini di pimpin oleh bapak Ibrahim, S.Pd.²⁰

Geografis dan Demografis

1. Geografis

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari kantor desa Semukut, bahwa desa Semukut merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulau Merbau yang luas wilayahnya 4800 M²/Ha, sebelah utara berbatasan dengan desa Centai atau desa Batang Meranti, sebelah selatan berbatasan Selat Rengit, sebelah timur berbatasan Selat Air Hitam, sebelah barat desa Padang Kamal. Jarak ke ibukota kabupaten 12,7 km, jarak ke ibu kota Provinsi Riau 140 km. Desa Semukut ini terbagi dari 3 (Tiga) Dusun. Yaitu Dusun Parit Masjid, Dusun Parit Baru, dan Dusun Mempalai.²¹

2. Demografis

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk yang ada di desa Semukut berjumlah 2218 jiwa, dengan jumlah 559 Kepala Keluarga, pada akhir tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.²²

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Data Profil Desa Semukut Tahun 2019, h. 1.

²² *Ibid.*, h. 3-4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	1073	48 %
2.	Perempuan	1145	52%
Jumlah		2218	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintah Desa Semukut 2019

Dari tabel di atas merupakan gambaran jumlah penduduk desa Semukut secara umum, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur dan usia.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	0-5 Tahun	274	12%
2.	5-13 Tahun	306	14%
3.	14-19 Tahun	413	19%
4.	20-30 Tahun	609	27%
5.	41-74 Tahun	580	26%
6.	Usia \geq 75 Keatas	36	2%
Jumlah		2218	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintahan Desa Semukut 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat. Desa Semukut menunjukkan ketertinggalan jika dibandingkan dengan desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Pulau Merbau. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di desa Semukut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:²³

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Taman Kanak-kanak	57	8%
2.	Sekolah Dasar	205	27%
3.	SMP & SMA	294	39%
4.	Akademik(D1-D3)	48	6%
5.	Sarjana (S1) & Magister (S2)	150	20%
Jumlah		754	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintahan Desa Semukut 2019

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah sebanyak 754 orang tergolong kepada masyarakat yang sedang dalam pendidikan, bila

²³ *Ibid.*, h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut usia yang jumlahnya 2218, maka tidak sejalan dikarenakan dari jumlah penduduk yang tidak termasuk kedalam kategori jumlah penduduk menurut pendidikan berjumlah 1464 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Play Group	3	30%
2.	TK	1	10%
3.	SD/Sederajat	3	30%
4.	MTS/Sederajat	1	10%
5.	SMA/Sederajat	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintahan Desa Semukut 2019

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau sebagai berikut:

a. Tingkat Play Group berjumlah 3 (Tiga):

- 1) Play Group Permata Bunda
- 2) Play Group Permata Hati
- 3) Play Group Kurnia

b. TK berjumlah 1 (Satu):

- 1) TK Cahaya Bunda Semukut

c. SD/Sederajat berjumlah 3 (Tiga):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) SD Negeri 007 Desa Semukut
- 2) SD Negeri 009 Desa Semukut
- 3) MI Hidayatul Mubtadiin Semukut
- d. MTs/Sederajat yang berjumlah 1 (Satu):
 - 1) MTs Hidayatul Mubtadiin Semukut
- e. SMA/Sederajat yang berjumlah 2 (Dua):
 - 1) MA Hidayatul Mubtadiin Semukut
 - 2) SMA Tuah Anak Negeri Semukut

2. Kehidupan Beragama

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Semukut yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2218 jiwa, mayoritas penduduk yang berada di desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti beragama Islam. hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:²⁴

Tabel 2.5
Jumlah Penganut Agama

No.	Agama	Jiwa	Persentase (%)
1.	Islam	2045 Orang	92%
2.	Kristen	27 Orang	1%
3.	Katholik	- Orang	0%
4.	Hindu	- Orang	0%
5.	Budha	146 Orang	7%
Jumlah		2218	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintahan Desa Semukut 2019

²⁴ *Ibid.*, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-Masing Agama

No.	Jenis Peribadatan	Jumlah
1.	Jumlah Masjid	5
2.	Jumlah Langgar/Surau/Musholla	7
3.	Jumlah Gereja Kristen Protestan	-
4.	Jumlah Gereja Khatolik	-
5.	Jumlah Wihara	-
6.	Jumlah Pura	-
7.	Jumlah Klenteng	-

Sumber: Statistik kantor Pemerintah Desa Semukut 2019

Berdasarkan gambaran tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa di desa Semukut pada umumnya tempat sarana peribadatan masih dominan umat Islam.

D. Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau dihuni oleh berbagai suku, diantaranya adalah suku Melayu, Jawa, Akit dan lain-lainya. Penduduk desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau berjumlah 2218 dari keseluruhan laki-laki dan perempuan.

Perekonomian masyarakat desa Semukut berada pada posisi menengah bila dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan dapat dilihat dari tempat tinggal, juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga. Adapun perincian mata pencaharian masyarakat desa Semukut dapat dilihat pada tabel berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.7
Jenis Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	PNS	23 orang	1%
2.	Swasta	94 orang	5%
3.	Wira swasta	124 orang	7%
4.	Petani	1185 orang	65%
5.	Pertukangan	18 orang	1%
6.	Buruh Tani	317 orang	17%
7.	Pensiunan	4 orang	1%
8.	Nelayan	46 Orang	2%
9.	Pemulung	-	%
10.	Jasa	5 Orang	1%
Jumlah		1816 orang	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintahan Desa Semukut 2019

Dari tabel di atas menunjukkan sebanyak 1816 orang sudah memiliki pekerjaan, bila di bandingkan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya sebanyak 2218, maka 402 orang belum memiliki mata pencarian dikarenakan masih dalam usia anak-anak yang tergolong kedalam pelajar. Dapat dipahami sebagian besar masyarakat desa Semukut bermata pencaharian sebagai Petani. Buruh tani sekaligus sumber nafkah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping menggarap hasil panen karet dan rumbia, ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, wiraswasta, swasta dan pertukangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat Istiadat

Masyarakat desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti menganut sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat desa. Juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang.

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimana pun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.²⁵

1. Pesta perkawinan

Merupakan hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang perkawinan. Adapun pesta perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di desa Semukut melalui beberapa tahap:

- a. Sebelum akad nikah, mempelai pria atas kesepakatan kedua belah pihak harus mengantarkan antaran atau uang yang jumlahnya telah disepakati. Hal ini di luar mahar.
- b. Setiap mempelai wanita harus khatamal Al-qur'an. Setelah khataman Al-Qur'an dilanjutkan dengan walimatul urys.
- c. Saat pihak mempelai laki laki datang ke rumah pihak perempuan disambut dengan pencak silat dan berbalas pantun.

²⁵ *Ibid.*, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyemah

Menyemah adalah suatu bentuk kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindarkan musibah pada lokasi tersebut. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang tertua kampung dengan memberikan sesajen kepada penungu kampung atau yang dikenal dengan jin penunggu. Dan selama proses ini berlangsung masyarakat tidak dibolehkan merusak.

Peran adat istiadat dalam masyarakat dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa. Sarana transportasi di desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti juga menggunakan sarana transportasi angkutan umum yakni sepeda motor dan gerobak yang beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian sarana transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi bekerja dan juga dapat dipakai untuk membawa barang.

Sarana komunikasi di desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga menerima sebagian informasi dan berita-berita melalui sarana radio dan televisi dengan memanfaatkan *receiver* atau parabola.²⁶

²⁶ *Ibid.*, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis Tentang Kegiatan Pelayaran

1. Pengertian Pelayaran

Hukum laut dalam arti luas mencakup segala aspek penggunaan atau pemanfaatan laut dan sumber-sumber yang terdapat di lautan. Dalam literatur hukum di negara-negara kontinental seperti negeri Belanda, hukum laut umumnya diartikan pula sebagai hukum pelayaran yang terutama berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Di negara-negara yang menganut sistem *anglo-saxon* dikenal istilah hukum maritim sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang berfokus pada pengangkutan melalui laut yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Dapatlah dikatakan bahwa hukum pelayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas.²⁷

Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Maka, tidak heran jika undang-undang

²⁷ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku I*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut secara pokok-pokok memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai aspek pelayaran, yaitu kenavigasian, kepelabuhanan, perkapalan, angkutan, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan (*search and secure*), pencegahan dan pencemaran oleh kapal, disamping dimuatnya ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan, sumber daya manusia, penyidikan dan ketentuan pidana.²⁸

2. Asas dan Tujuan Pelayaran

Asas-asas mengenai pelayaran dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. Asas persaingan sehat;
- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. Asas keterpaduan;
- h. Asas tegaknya hukum;
- i. Asas kemandirian;
- j. Asas berwawasan lingkungan hidup;

²⁸ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku II*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Asas kedaulatan negara; dan

l. Asas kebangsaan.

Pelayaran sebagai sektor di lingkungan maritim Indonesia tentu memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- b. Membina jiwa kebaharian;
- c. Menjunjung kedaulatan negara;
- d. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;
- e. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- f. Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara; dan
- g. Meningkatkan ketahanan nasional.

3. Jenis-Jenis Kegiatan Pelayaran

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, jenis-jenis pelayaran dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yakni: pelayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam negeri, pelayaran luar negeri dan pelayaran khusus yang dapat diperinci sebagai berikut.²⁹

a. Pelayaran Dalam Negeri

- 1) Pelayaran nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh, satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelayaran lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran dibawah 500 m³.

b. Pelayaran Luar Negeri

- 1) Pelayaran samudera dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3000 mil laut dari pelabuhan terluar di Indonesia, tanpa memandang jurusan.
- 2) Pelayaran samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.

c. Pelayaran Khusus, yaitu pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk pengangkutan hasil industri, pertambangan dan hasil-hasil usaha lainnya yang bersifat khusus.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

²⁹ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat)*, (Jakarta: Djambatan, 1993), jilid 5 (b), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayaran, kegiatan pelayaran dibedakan berdasarkan jenis angkutan di perairan, yang terdiri dari :

- a. Angkutan laut;
- b. Angkutan sungai dan danau; dan
- c. Angkutan penyeberangan.

Sedangkan dalam Pasal 7, jenis angkutan laut dikembangkan lagi klasifikasinya menjadi :

- a. Angkutan laut dalam negeri;
- b. Angkutan laut luar negeri;
- c. Angkutan laut khusus; dan
- d. Angkutan laut pelayaran-rakyat.

B. Konsep Teoritis Kelaiklautan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan:³⁰

1. Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta kapal. Persyaratan keselamatan kapal diatur berdasarkan SOLAS 1974:

- a. Bagi pelaut yang telah di izinkan dapat diberikan Buku Pelaut;

³⁰ *Ibid.*, h. 40-45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Buku Pelaut adalah identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun dari kapal di luar negeri. Buku pelaut seperti: nama, tempat, dan tanggal lahir, kebangsaan ijazah yang dimiliki serta pengalaman berlayar.
- c. Persyaratan untuk bekerja di kapal:
 - 1) Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
 - 2) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang ditunjuk pemerintah;
 - 3) Memiliki sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat;
 - 4) Keterampilan Pelaut; dan
 - 5) Disjil.

2. Pencegahan Pencemaran

Pencegahan pencemaran dari kapal diatur berdasarkan Konvensi Internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal (MARPOL 73/78). MARPOL 73/78 terdiri dari 6 lampiran (Annex) :

- a. Annex I: Peraturan pencegahan pencemaran oleh minyak.
- b. Annex II: Peraturan pengawasan pencemaran oleh zat cair beracun yang diangkut dalam bentuk cair.
- c. Annex III: Peraturan pencegahan pencemaran oleh barang berbahaya yang diangkut dalam kemasan.
- d. Annex IV: Peraturan pencegahan oleh kotoran (sewage) dari kapal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Annex V: Peraturan pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal.
- f. Annex VI : Peraturan pencegahan pencemaran udara dari cerobong kapal.

3. Pengawakan

Kapal harus diawaki dengan awak kapal yang cukup, cakap dan memiliki sertifikat yang diharuskan serta sehat jasmani dan rohani sesuai pemeriksaan dari rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah. Setiap awak kapal harus familiar dengan tugas-tugasnya di kapal dan menguasai peralatan yang ada di kapal serta dapat berkoordinasi dengan baik dalam menanggulangi keadaan darurat. Jumlah awak kapal minimum sesuai dengan *Safe Manning Certificate* dan susunan perwiranya sesuai ketentuan Pemerintah.

4. Pemuatan

- a. Susunan pemuatan harus diperhatikan baik yang menyangkut stabilitas kapal maupun yang menyangkut masalah keselamatan. Muatan tidak boleh mengganggu pemandangan dari anjungan serta tidak mengganggu operasi alat-alat penolong dan pemadam kebakaran. Stabilitas kapal harus baik dan selamat untuk berlayar.
- b. Batas benaman tidak boleh melebihi garis Plimsol sesuai daerah dan musim. Penentuan letak Plimsol Mark didasarkan perhitungan sesuai *Load Line Convention* 1996 dimana sertifikatnya harus ada di kapal.

5. Kesejahteraan dan Kesehatan Awak Kapal

Persediaan permakanan harus mencukupi selama pelayaran baik untuk awak kapal maupun untuk penumpang. Jumlah kamar mandi serta persediaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air tawar harus cukup untuk awak kapal dan penumpang. Ketentuan mengenai persyaratan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 dan Konvensi ILO 147.

6. Status Hukum Kapal

Kapal harus mempunyai surat tanda kebangsaan yang masih berlaku sesuai ukuran kapal.

Tinjauan Teoritis Pengangkutan

1. Definisi Pengangkutan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³¹ Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata ‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.³²

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang

³¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.³³ Pengangkutan menurut R. Soekardono berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.³⁴

Sedangkan menurut HMN Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³⁵ Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian dari pengangkutan yaitu mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat yang didahului atau diawali dengan adanya perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang.

2. Jenis Pengangkutan

Dalam pengangkutan, terdapat beberapa jenis pengangkutan yang dapat

³³ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), h. 4.

³⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), h. 5.

³⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibedakan menjadi :

a. Pengangkutan Kereta Api

Menurut undang-undang pengkeretaapian, yang dimaksud dengan angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.³⁶ Sedangkan definisi dari kereta api sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.³⁷

b. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat atau pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan dan telah mendapatkan izin usaha dan izin operasi dari pemerintah. Contoh dari pengangkutan darat ini yaitu seperti bus, truk, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengangkutan darat atau pengangkutan jalan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Pengangkutan Perairan

Pengangkutan perairan merupakan kegiatan pengangkutan atau

³⁶ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

³⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memindahkan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan transportasi kapal. Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai dan danau, serta pengangkutan penyeberangan. Pengaturan mengenai pengangkutan perairan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayaran, perairan laut Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan, dan perairan pendalamannya. Sedangkan pengertian angkutan di perairan itu sendiri meliputi:³⁸

- 1) Angkutan laut, yaitu meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran;
- 2) Angkutan sungai dan danau, meliputi angkutan di waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan;
- 3) Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan.

d. Pengangkutan Udara

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan

³⁸ Bab V Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan Udara Bukan Niaga.³⁹ Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.⁴⁰

3. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan

Dalam penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu :

a. Pengangkut

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.⁴¹

b. Pengguna Jasa/Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengkeretaapian yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang”. Pengguna jasa atau konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁴⁰ Abidin A. Kurnia Ecla Julianto, “*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah, (Yogyakarta: 2015).

⁴¹ HMN. Purwosutjipto, *Op.Cit*, h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴² Pengguna jasa/ konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Penumpang

Pengguna jasa atau konsumen yang dimaksud adalah pihak penumpang dari kegiatan pengangkutan kereta api. Menurut Abdul Kadir, penumpang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan. Penumpang memiliki 2 (dua) kedudukan dalam kegiatan pengangkutan, yaitu sebagai subjek karena merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena merupakan muatan yang diangkut.⁴³

2) Pengirim dan Penerima Barang

Pengirim barang merupakan orang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan barang yang akan diangkut oleh pengangkut dan memberikan upah atau ongkos atas jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan penerima barang adalah pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim barang.

Kapal Sebagai Sarana Transportasi Laut

1. Pengertian Kapal

Sebelumnya di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kapal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejarah

⁴² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kali yang membuat kapal adalah bermula pada kisah Nabi Nuh. As. Salah satunya ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kapal adalah QS. Luqman ayat 31 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١

Artinya: “tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.” (QS. Luqman: 31).

Pasal 309 ayat (1) KUHD menyebutkan: “*Schepen zijn alle vaartuigen, hoe ook genaamd en van welken aard ook*” (kapal adalah semua alat berlayar, apapun namanya dan sifatnya). Jadi, yang disebut “kapal” itu apa saja, asal termasuk dalam pengertian “alat berlayar”. Tetapi dalam pengertian “alat berlayar atau kapal” itu, unsur “dapat berlayar” tidak merupakan unsur mutlak, sebab menurut keputusan H.R. tanggal 8 Juni 1956, 1957 “perahu tempat tinggal” (*woonark*), termasuk dalam pengertian kapal. Juga termasuk dalam pengertian kapal:

- a. Kapal karam (*Hof Leewarden*);
- b. Mesin pengeruk lumpur;
- c. Alat pengangkat terapung (*drijvende kraan*).

Dalam pasal 309 ayat (3) KUHD menyatakan bahwa alat perlengkapan itu bukan bagian dari kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai tetap dengan kapal. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian kapal tersebut adalah bangunan-bangunan yang menjadi satu dengan kerangka kapal, sehingga kalau bangunan itu diambil atau dilepaskan, maka kapal menjadi rusak. Bangunan-bangunan ini misalnya:⁴⁴

- a. Anjungan (*Bridge*), yaitu bagian kapal yang teratas, dimana para nahkoda dan mualim berada untuk mengatur jalannya kapal;
- b. Lunas kapal, yaitu bagian kerangka kapal yang terbawah sendirian, terbuat dari besi, dan kalau lunas itu dilepaskan dari kerangka kapal, maka kapal itu rusak;
- c. Haluan kapal, yaitu bagian yang dimuka sendiri, dimana sering diberi hiasan menurut kesukaan pemilik kapal, misalnya kepala ular naga dan lainnya.

Menurut Molengraaff memberikan definisi pada “*vaartuigen*” dengan mengatakan alat berlayar meliputi semua benda yang disusun untuk tetap tinggal di air dan untuk bergerak disana (berlayar), tidak peduli apakah dia memiliki kekuatan gerak di dalamnya atau kekuatan gerak itu dari luar, yang dikenakan padanya, seperti halnya dengan ditarik. Termasuk dalam pengertian “*vaartuigen*” ini menurut Molengraaff ialah perahu kecil, tongkang, kapal dog, kapal pengeruk lumpur, penyedot pasir, jembatan kapal, rakit dan lain sebagainya.⁴⁵

⁴⁴ HMN. Purwosutjipto, *Op.Cit*, h. 14.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut HMN. Purwosutjipto bahwa apa yang disebut “alat berlayar” (*vaartuig*) itu ialah benda yang mempunyai dua sifat, yaitu bisa mengapung dan bergerak di air, dengan catatan bahwa sifat itu tidak perlu terus-menerus ada. Kata “bisa” disini menunjukkan adanya sifat yang relatif, yang tidak perlu terus-menerus ada.⁴⁶

Pasal 310 ayat (1) KUHD berbunyi: “kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut yang diperuntukkan untuk itu.” Menurut HMN. Purwosutjipto kriteria apa yang disebut kapal laut meliputi:

- a. Kapal laut ialah kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut, sudut pandang: di laut, atau
- b. Kapal laut ialah kapal yang diperuntukkan bagi pelayaran di laut, sudut pandangan: di galangan kapal (tempat membuat kapal).

Sedangkan menurut pasal 1 angka 36 Undang-Undang Pelayaran merumuskan pengertian kapal sebagai berikut:

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”⁴⁷

2. Jenis-Jenis Kapal

Jenis-jenis kapal dapat ditinjau dari sarana penggerakannya, ditinjau dari fungsinya, dan ditinjau dari daerah pelayarannya.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 12.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jenis kapal ditinjau dari sarana penggerakannya antara lain:⁴⁸

- 1) Kapal motor, yaitu kapal yang digerakkan dengan motor atau mesin diesel sebagai alat penggerak utama dan bukan kapal yang digandeng/sedang di gandeng.
- 2) Kapal uap, yaitu kapal yang diegerakkan dengan tenaga uap sebagai penggerak utama dan bukan kapal yang digandeng.
- 3) Kapal layar, yaitu kapal yang digerakkan dengan layar sebagai alat penggerak utama dan bukan kapal yang digandeng.
- 4) Kapal yang digandeng, yaitu kapal yang sedang digandeng dan tidak menggunakan alat penggerak sendiri.
- 5) Kapal nuklir, yaitu kapal yang dilengkapi dengan instalasi tenaga nuklir sebagai sumber kekuatan penggerakannya.

b. Jenis kapal ditinjau dari fungsinya antara lain:⁴⁹

- 1) Kapal muatan umum, biasanya dikonstruksi “*shelter deck*” dan mempunyai lebih dari satu dek (memakai dek antara).
- 2) Kapal curah (*bulk carrier*), yang kemudian dibagi-bagi menurut jenis muatan curah yang diangkutnya, misalnya: *ore carrier*, *log carrier*, tanker dan lain-lain. Biasanya konstruksinya kokoh atau “*full scantling*” dan pada umumnya satu dek.
- 3) Kapal tunda (*Tug Boat*), yaitu kapal digunakan untuk menunda,

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998),

⁴⁹ *Ibid.*, h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggandeng atau mendorong kapal lain yang membutuhkannya. Kapal ini umumnya digunakan dipelabuhan untuk membantu kapal-kapal merapat ke dermaga atau di laut untuk membantu kapal-kapal yang rusak atau dalam keadaan bahaya guna membawanya ke pelabuhan untuk bantuan atau perbaikan.

- 4) Kapal gas (*gas carrier*), yang dibangun dengan palka-palka tertutup berupa tanki, misalnya L.P.G carrier (*liquefied pressed gas carrier*) atau L.n.g. (*liquefied natural gas carrier*).
- 5) Kapal keruk (*dredger*), yaitu kapal yang dirancang dengan dilengkapi alat untuk mengaduk atau mengisap lumpur. Kapal tipe ini umumnya digunakan dipelabuhan atau alur pelabuhan untuk memperdalam atau mempertahankan kedalaman laut.
- 6) Kapal suvei (*survey vesssel*).
- 7) Kapal bor (*drilling vessel*), dilengkapi dengan bor untuk pemboran minyak.
- 8) Kapal peti kemas, dilengkapi dengan stabilitas awal yang bagus dan digunakan untuk mengangkut peti kemas sampai-sampai 4 atau 5 meter di atas dek.
- 9) Kapal tongkang atau *lash ship* (*lighter aboard ship*), hampir sama dengan kapal peti kemas, tetapi yang diangkut berupa tongkang. Perkembangan terakhir kapal ini disebut juga *flah vessel* (*floating lighter aboard vessel*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Kapal muatan dingin (*retrigerated vessel*), yaitu suatu kapal yang dibangun secara khusus, sehingga ruangnya merupakan ruangan dingin yang dapat mengangkut muatan dingin atau muatan beku.
 - 11) Kapal pukat tambat (*trawler*), yaitu kapal penangkap ikan yang khusus dibangun untuk dapat menarik pukat tarik (*jaring dogol*).
 - 12) Kapal kabel (*cable lying vessel*), dibangun khusus untuk memasang dan mengangkat kabel laut.
 - 13) Kapal selam (*submarine*), biasanya digunakan oleh kapal laut.
 - 14) Kapal ro-ro (*roll on-roll off ship*), dibangun sedemikian rupa sehingga kalau kapal tersebut bersandar di dermaga, maka muatan dapat dibuat dan dibongkar langsung ke dan dari palka dengan kendaraan, misalnya *forklift truck*.
 - 15) Kapal pendarat (*landing ship*), ada bermacam-macam menurut besar yang didaratkan.
- c. Jenis kapal ditinjau dari daerah pelayarannya antara lain:⁵⁰
- 1) Kapal yang digunakan untuk semua pelayaran lautan (pelayaran samudra), yaitu pelayaran di perairan di seluruh daerah pelayaran dunia.
 - 2) Kapal yang digunakan untuk pelayaran kawasan Indonesia, terdiri dari dua pelayaran yaitu pelayaran terbatas antar pelabuhan-pelabuhan timur.
 - 3) Kapal yang digunakan untuk pelayaran lokal, yaitu pelayaran dalam dan

⁵⁰ Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal, h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perairan luar (diluar daerah pelabuhan) dengan kapal yang isi kotornya kurang dari 500 m³ dengan jarak jelajah tidak lebih dari 200 mil dari pelabuhan basis.

Jenis kapal yang ditinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal yang di pakai di daerah pelayaran semua lautan, pelayaran kawasan Indonesia, dan pelayaran lokal.

3. Bukti Kebangsaan Kapal Laut Indonesia

Kapal laut Indonesia menurut ordonansi kapal-kapal tahun 1935 ialah kapal untuk mana telah diberikan bukti kebangsaan Indonesia atau surat izin sebagai penggantinya, kecuali jika izin itu sudah tidak berlaku lagi. Mengenai bukti kebangsaan Indonesia atau izin sebagai gantinya, diatur dalam “*Beslit*” pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “kapal laut Indonesia adalah kapal laut yang dimiliki oleh: seorang atau lebih warga negara Indonesia; dan sedikitnya dua pertiga bagian milik seorang atau lebih warga negara Indonesia sedangkan selebihnya dimiliki oleh seorang atau lebih penduduk Indonesia, dengan syarat bahwa pemegang buku, kalau ini ada, haruslah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.”⁵¹

⁵¹ HMN Purwosutjipto, *Op.Cit*, h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai bukti kebangsaan kapal laut Indonesia, ada dua peraturan yang perlu diperhatikan yaitu “*Zeebrieven en Scheepspassen Besluit 1934* (S. 1934-78 jo. 35-565, m.b. 1 Desember 1935) dan *Zeebrieven en Scheepspassen Ordonnantie 1935* (S. 1935-492 jo 565, m.b. 1 Desember 1935)”. Kedua peraturan tersebut ada beberapa definisi yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵²

- a. Laut yaitu semua daerah laut, termasuk teluk, teluk yang panjang dan sempit (*zeearmen*) dan selat, di luar batas tembok pelabuhan yang ditentukan (Pasal 1 Besluit tentang Surat-surat Laut dan Pas-Pas Kapal, 1934);
- b. Kapal laut yaitu tiap alat berlayar yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan untuk itu (Pasal 1 Besluit);
- c. Kapal nelayan yaitu kapal laut yang semata-mata dipergunakan untuk menangkap atau memperoleh ikan atau hasil laut lainnya, dan/atau pengangkutannya dan semua yang diperlukan untuk melakukan perusahaan, kecuali kalau kapal itu isi kotornya 100 m³ atau lebih dan dilengkapi dengan alat penggerak mekanik;
- d. Kapal pesiar yakni kapal laut yang semata-mata dipergunakan untuk pesiar saja (c dan d, pasal 1 Ordonansi Surat-Surat Laut dan Pas-Pas Kapal 1935).

Pasal 3 Beslit tentang Surat-Surat Laut dan Pas-Pas Kapal 1934 ayat (1) berbunyi “kepada kapal laut Indonesia dapat diberikan bukti kebangsaan dalam bentuk surat laut, pas kapal, surat laut sementara dan izin berlayar”

⁵² *Ibid.*, h. 20-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Surat Laut Sementara

Kapal yang dibeli atau dibangun di luar Indonesia, pada waktu akan dibawa pulang ke Indonesia, dapat diberi surat laut sementara oleh Menteri Perhubungan RI, bila kapal tersebut sudah memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam tiga ayat pertama dari pasal 2 Beslit, yaitu:

- 1) Adanya surat bukti pemilikan;
- 2) Dimiliki oleh warga negara RI; atau
- 3) Dimiliki oleh penduduk negara RI dengan syarat-syarat tertentu.

Surat laut sementara itu dapat diberikan paling lama untuk waktu satu tahun. Sesudah sampai di Indonesia, kapal itu harus segera dimintakan surat laut tetap menurut prosedur biasa. Permohonan untuk mendapat surat laut sementara dapat diajukan melalui pejabat Konsuler RI ditempat kapal itu berada (pasal 5 ayat (1) s/d (4) Beslit).

b. Izin tertulis untuk berlayar

- 1) Izin tertulis untuk berlayar satu atau beberapa kali, atas permohonan kepada Menteri Perhubungan RI, dapat diberikan oleh pejabat Konsuler RI diluar negeri, dengan syarat bila kapal yang dimintakan izin berlayar itu telah memenuhi syarat sebagai yang ditetapkan dalam Beslit (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Beslit).
- 2) Pejabat Konsuler RI tersebut juga berwenang untuk memberi izin tertulis bagi kepentingan kapal, yang baginya dapat diberikan pas kapal, untuk melakukan pelayaran ke Indonesia;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Izin tertulis untuk berlayar itu paling lama hanya diberikan selama 6 (enam) bulan;
- 4) Bagi kapal yang dibeli atau dibuat di Indonesia atas biaya negara asing dan akan berlayar kembali ke negara tujuannya, atau kapal yang dalam keadaan tertentu akan melakukan pelayaran sekali saja ke suatu tempat di Indonesia, Menteri Perhubungan RI atau pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan izin tertulis untuk berlayar selama waktu yang ditentukan oleh ordonansi tentang surat laut dan pas kapal (Pasal 6 Beslit).
- c. Surat laut

Surat laut dan pas kapal ini diatur dalam Ordonansi Surat Laut dan Pas Kapal 1935. Surat laut itu diberikan untuk kapal laut yang isi kotornya 500 m³ atau lebih, yang bukan kapal nelayan laut atau kapal pesiar (Pasal 3 Ordonansi). Surat ini diberikan oleh Menteri Perhubungan RI untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dibuat menurut model yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 3 ayat (2) Ordonansi).
- d. Pas kapal

Pas kapal ini diatur dalam pasal 4 Ordonansi. Pas kapal diberikan pada kapal yang tidak dapat diberi surat laut. Pas kapal ada dua macam, yaitu:

 - 1) Pas tahunan diberikan kepada kapal yang isi kotornya 20 m³ atau lebih, tetapi kurang dari 500 m³, yang bukan kapal nelayan laut atau kapal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesiar (Pasal 4 ayat (1) sub a, Ordonansi). Pas tahunan diberikan untuk satu tahun dan paling lam 15 bulan (Pasal 4 ayat (3) Ordonansi).

- 2) Pas kecil atau pas biru diberikan kepada kapal yang isi kotornya kurang dari 20 m³, kapal nelayan laut dan kapal pesiar. Pas kecil diberikan untuk waktu yang tidak tertentu, tetapi tiap tahun harus diperlihatkan (*geviseerd*) kepada pejabat yang berwenang (Pasal 4 ayat (4) Ordonansi).⁵³

4. Pendaftaran Kapal

Pasal 314 ayat (1) KUHD berbunyi: “Kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor, dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu ordonansi tersendiri”. Ordonansi yang dimaksud adalah ordonansi tentang “Pendaftaran Kapal” (*Teboekstelling van Schepen*)_ S. 1933-48 jo. 38-2, m.b. 1 April 1938, disingkat OPK (Ordonansi Pendaftaran Kapal).

Pasal 314 ayat (2) KUHD menentukan tentang apa saja yang harus diatur dalam ordonansi pendaftaran kapal, yaitu:

- a. Caranya peralihan hak milik dan penyerahan kapal-kapal atau kapal dalam pembangunan yang sudah didaftar dalam register kapal;
- b. Caranya peralihan hak milik dan penyerahan bagian/porsi pada kapal-kapal atau kapal dalam pembangunan yang sudah terdaftar.

⁵³ *Ibid.*, h. 23-24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal tersebut di atas diperinci lagi dalam pasal 3 ayat (1) Ordonansi Pendaftaran Kapal, seperti tersebut dibawah ini:

- a. Pendaftaran kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor, kecuali kapal tak bermotor yang berukuran kurang dari 100 m³ isi kotor;
- b. Pendaftaran sementara kapal dalam pembangunan;
- c. Cara peralihan hak milik dan penyerahan (balik nama kapal);
 - 1) Kapal siap laut/kapal dalam pembangunan yang terdaftar;
 - 2) Porsi atas kapal siap laut atau kapal dalam pembangunan yang terdaftar;
- d. Pembuatan akta perubahan golongan kapal, misalnya: golongan kapal laut dirubah menjadi golongan kapal perairan darat (pendalaman);
- e. Pembebanan hipotek atas kapal siap laut atau kapal dalam pembangunan yang telah terdaftar;
- f. Penetapan mengenai hak milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal atau kapal dalam pembangunan, yang telah diakui dengan putusan Hakim.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, h. 32-35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keberadaan kapal-kapal di pelabuhan penghubung desa Semukut yang memberikan jasa pengangkutan ini, telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kapal dinyatakan laik laut harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan diberi sertifikat keselamatan oleh menteri perhubungan laut ataupun pihak kesyahbandaran. Sertifikat keselamatan terdiri atas: sertifikat keselamatan kapal penumpang; sertifikat keselamatan kapal barang; dan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. Undang-undang juga telah memberikan ketentuan terhadap perusahaan kapal-kapal yang melakukan aktivitas pengangkutan di laut. Dalam pemberian izin usaha, terdapat syarat yang harus di penuhi oleh perseorangan warga negara Indonesia maupun badan usaha tersebut, yaitu terkait dengan persyaratan teknis, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
2. Bentuk tanggung jawab pegangkut melalui kapal motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; c) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau; d) Kerugian pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Perlu diketahui bahwa kapal-kapal kayu yang berada di perairan Kepulauan Meranti ini sebagian besar dimiliki oleh masyarakat golongan rendah yang kurang dengan pendidikan. Dimana mereka bekerja dilaut ini hanya bermodal keberanian serta pengalaman bekerja di tempat lain, tanpa memikirkan bahaya timbul dilaut yang sangat besar. Untuk itu, penulis berharap kepada pemerintah, khususnya pihak kesyahbandaraan agar bisa memberikan sosialisasi serta penyuluhan kepada semua pemilik kapal-kapal kayu khususnya. Tidak hanya itu pihak kesyahbandaraan juga bisa memberikan semacam pelatihan kepada pelaut-pelaut yang akan melakukan pelayaran di laut.
2. Besarnya tanggung jawab yang akan di pikul oleh pengangkut selaku pemilik jasa pengangkutan apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam pelayaran, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru baik dari pihak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan maupun dari pihak

pemilik kapal tersebut. Untuk itu penulis menyarankan kepada pemilik kapal agar kiranya memberikan perjanjian tertulis kepada konsumen apabila dalam pengangkutan barang maupun penumpang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al Bram, Djafar. 2011. *Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku I): Pengertian, Asas-Asas, Hak Dan Kewajiban Para Pihak*. (Jakarta: PKIH FHUP).
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Peneletian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Dagang*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia Edisi Revisi Cet-10*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hari Wisudo, Sugeng. *Wilayah Perairan Indonesia*. (LUHT4455-M1).
- Kadir Muhammad, Abdul. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- _____. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Martono, HK. 2011. *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Purba, Hasim. 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*. (Medan: Pustaka Bangsa Press).
- Purwosutjipto, HMN. 1993. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat), Jilid 5 (b)*. (Jakarta: Djambatan).
- _____. 2001. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. (Jakarta: Djambatan).
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekardono, R. 1969. *Hukum Perkapalan Indonesia*. (Jakarta : Dian Rakyat).
- _____. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali).
- Sudjatmiko. 1979. *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*. (Jakarta: Bharata Karya Aksara).
- Suwardjoko, W arpani. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. (Bandung: Institut Teknolongi Bandung).
- Tjakranegara, Soegijatno. 2005. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet ke-2*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Umar, Hussyen. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- _____. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku II*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- _____. 2008. *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim (Bab 14 : Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008)*. (Jakarta: Ind-Hilco).
- Usman Adji, Sution. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) oleh F.M. Prasetyo. 2015.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga

Jurnal:

Data Profil Desa Semukut Tahun 2019.

Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017.

D. Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran_rakyat.

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>.

[www.http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-semukut.html](http://ismunandars.blogspot.com/2011/08/sejarah-desa-semukut.html).



LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK KAPAL

Nama : _____

Alamat : _____

1. Berapakah ukuran kapal yang bapak miliki?
2. Apakah bapak mengelola kapal dengan sendirinya atau mempunyai tenaga pembantu (Anak Buah Kapal)?
3. Apakah bapak mengetahui terkait dokumen-dokumen yang harus dimiliki sebagai pemilik kapal?
4. Apakah kapal yang bapak miliki pernah dilakukan perbaikan dan perawatan?
5. Pernahkan para konsumen komplain atas jasa pengangkutan bapak?
6. Dalam membawa barang konsumen, pernahkah terjadi kekurangan atau kehilangan barang, dan seperti apa pertanggungjawabannya?
7. Sejauh ini, dalam pelayaran apakah bapak pernah mengalami kecelakaan?
8. Tanggung jawab seperti apa yang pernah bapak ketahui atau alami ketika terjadi kecelakaan dalam pelayaran terhadap para konsumen?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1: Wawancara dengan bapak Helmi Fikri (Syahbandar Kab. Kep. Meranti)



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Umayyah Yatim (Dishub Kab. Kep. Meranti)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3: Kondisi Pelabuhan Penghubung desa Semukut



Gambar 4: Kapal sedang berlayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5: Kapal Tampak dari depan



Gambar 6: Beberapa Kapal tampak dari samping

PAS KECIL

No. : AL.520/ 06 / 10/KSOP.SLP-2019.

Diterbitkan berdasar kan ketentuan Pasal 59
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tangan di bawah ini **KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELATPANJANG** menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
REFQI	RIU 9 No. 537	6	2	2016
PENGGERAK UTAMA	UKURAN P x L x D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	
MESIN	13,00 x 2,80 x 1,00	MITSUBISHI 4D31C NO.585162 - 40 PK	KAYU	

Gunakan sebagai : **KAPAL PENGANGKUTAN**
 dan alamat pemilik : **ERAWADI - DESA SEMUKUT KEC. PULAU MERBAU**
 telah mendaftarkan dalam Register Pas Kecil di **KSOP SELATPANJANG**
 Nomor **RIU 9 No. 537** dan oleh karena itu berhak berlayar
 mengibarkan Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
 seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik
 Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya
 memperlakukan Nakhoda, Kapal dan Muatannya sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian
 dengan Negara-negara lain.

Diberikan di : **SELATPANJANG**

Pada tanggal : **15 JULI 2019**

An. MENTERI PERHUBUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 KEPALA KANTOR
**KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
 KELAS IV SELATPANJANG**

Petugas Kesyahbandaran

SUHARTO

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19660911 199203 1 002



Di datarkan dalam Register
 Pas Kecil di **KSOP SELATPANJANG**
 No. Urut **537**
 No. Halaman **37**
 Buku Register : **1V**

SURAT KESELAMATAN KAPAL

No. AL.501/ 06 / 10 /KSOP.SLP-2019

DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT.7

Diterbitkan menurut ketentuan

TENTANG STANDAR KAPAL NON - KONVENSI BERBENDERA INDONESIA

Sesuai

PETUNJUK TEKNIS NCVS, SK DIRJEN HUBLA NO. UM.008/9/20/DJPL-12

Nama Kapal
Alap

: ERAWADI
: DESA SEMUKUT KEC. PULAU MERBAU

Nama Kapal	Isi Kotor(GT)	Jenis Kapal	Ukuran Kapal (m)			Tempat dan Tahun Pembangunan
			P	L	D	
REFQI	6	CARGO	13.00	2.80	1.00	KETAPANG PERMAI TAHUN 2016

Tanpa Ap Bakar

: RIU 9 No. 537

Merk Motor

: MITSUBISHI

Daya

: 40

PK/KW/HP

Type : 4D31C

Nomor

: 585162

Jenis Bahan Bakar

: SOLAR

Badan Klasifikasi / Notasi

: ..

Material Ujung Lambung

: KAYU

Jumlah Sarana Akomodasi (Bangku)

: ..

Orang

Jumlah Awak Kapal Termasuk Pimpinan Kapal

: 3

Orang

Jumlah Pelaya selain awak kapal

: ..

Orang

Jumlah Perlengkapan keselamatan yang tersedia

: 1 Buah Life Bouys, 4 Buah Life Jackets

Dibuatkan berdasarkan pemeriksaan di :

SELATPANJANG

Tanggal : 15 JULI 2019

Berlaku hingga tanggal

: 14 JULI 2020

UIN SUSKA

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV SELATPANJANG
Petugas Kesyahbandaran

SUHARTO
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19660911 199203 1 002

TGL. 12-07-2019 S/D TGL.14-07-2019 DI DESA SEMUKUT

TAHUN 2020

DALAM DAERAH PELAYARAN PELABUHAN SELATPANJANG

Ditatan :
Dalam dok
Pemeriksaan umum y a. d
Daerah Pelayaran

Tanggal peletakan lunas
Apabila ada
Doret yang tidak perlu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BHRUL HAYAT
NIM : 11627104131
Tempat/Tanggal Lahir : SEMUKUT, 13 MEI 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PADA PERAIRAN SELAT RENGIT DESA SEMUKUT-SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 13 Mei 2020
Yang membuat pernyataan

BAHRUL HAYAT
NIM. 11627104131



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dianggap mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Dianggap mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. NAMA

: Bahrul Hayat

2. NOMOR MAHASISWA

: 11627104131

3. JUDUL USUL PENELITIAN

: Tinjauan hukum terhadap kelayakan kapal angkutan barang rute perairan serat rengit desa semukut-sialang pasung kabupaten kepulauan meranti

4. Hari/Tgl. Diseminarkan

: Senin / 18 November 2019

5. Hasil Seminar dirumuskan adalah

:

a. Judul

: ~~Disetujui / Ditolak~~ / Disempurnakan

b. Latar Belakang Masalah

: ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan

c. Permasalahan

: ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

: ~~Jelas / Mengambang~~ / Perlu Perbaikan

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

: ~~Jelas / Kurang Jelas~~ / Perlu Disempurnakan

f. Rumusan Hipotesis (jika ada)

: ~~Cukup Tajam~~ / Perlu Dipertajam

g. Metode Penelitian

: ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan

h. Daftar Pustaka

: ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Diumumkanlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya

disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

NARASUMBER


Peri Pirmansyah, SH, MH

Catatan :

Perubahan judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL
PENGKUTAN BARANG RUTE PERAIRAN SELAT RENGIT DESA SEMUKUT-
KELANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI", ditulis oleh saudara :

Nama : BAHRUL HAYAT
NIM : 11627104131
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 18 November 2019
Narasumber : Peri Pirmansyah, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019

Mengetahui,
Kepala bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Peri Pirmansyah, SH., MH
NIP. 130 217 120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2222/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : BAHRUL HAYAT
N I M : 11627104131
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

yang diselenggarakan pada tanggal : 9 DESEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NTP 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
No. : 04/F.I/PP.00.9/9833/2019
: Bisa
: 1 (satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :BAHRUL HAYAT
NIM :11627104131
Jurusan :Ilmu Hukum S1
Semester :VII (Tujuh)
Lokasi :Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau,
Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL ANGKUTAN BARANG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN PADA PERAIRAN SELAT RENGIT DESA SEMUKUT-
SEKILANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Di larang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29284
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/9833/2019 Tanggal 17 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | BAHRUL HAYAT |
| 2. NIM / KTP | 11627104131 |
| 3. Program Studi | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | S1 |
| 5. Alamat | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELAYAKAN KAPAL ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN PADA PERAIRAN SELAT RENGIT DESA SEMUKUT-SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | 1. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
2. DESA SEMUKUT-SIALANG PASUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

UIN SUSKA RIAU



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarung mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Diarung tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Diarung mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati Telp/ Fax. (0763) 33650
 E-Mail : dpmptspkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28133

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMTSPTK/II/2020/SKP/32

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29284 Tanggal 31 Desember 2019**, ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Bahrul Hayat

11627104131

Ilmu Hukum

S1

Pekanbaru

Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut – Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Desa Semukut – Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 03 Februari 2020

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
SEKRETARIS

TUNJIARTO, M.Pd

Pembina (IV/a)

NIP. 19711124 200312 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN PULAU MERBAU
DESA SEMUKUT**

Jalan Parit Baru No... Semukut Kec. Pulau Merbau Hp. 081365664142

Email : desasemukut@gmail.com

Website : www.semukut.desa.id

Kode Pos : 28752

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471 / PEM-DS/II/2020/042

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nama : **BAHRUL HAYAT**
NIM : 11627104131
Program Studi : Ilmu Hukum
Tingkat : S1
Alamat : Pekanbaru

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Nomor: 053/DPMPTSPTK/I/2020/32 tanggal 03 Februari 2010, bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Melanjutnya dapat kami terangkan bahwa nama tersebut diatas Melaksanakan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semukut, 05 Februari 2020
An. **KEPALA DESA SEMUKUT**



MIFTAHUSSURUR, S.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **BAHRUL HAYAT**

NIM : **11627104131**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Judul : ***Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti***

Pembimbing : **Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Mei 2020

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Bahrul Hayat, dilahirkan di Semukut pada tanggal 13 Mei 1998. Anak ke-5 (Lima) dari 5 (Lima) bersaudara ini merupakan putra dari pasangan bapak Ramli dan ibu Zainabun. Saat ini penulis berdomisili sementara di Masjid Miftahul Jannah Jl. Surya Garuda Sakti KM 3, Kel. Air Putih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 28 Semukut tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di MTs. Hidayatul Muhtadiin Semukut tamat pada tahun 2013, dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke MA. Hidayatul Muhtadiin Semukut Kec. Pulau Merbau yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 juga, penulis diterima di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2019 Penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru, setelah itu mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kel. Melayu Besar Kota Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir. Pada tanggal 27 April 2020 penulis dinyatakan lulus dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti” dengan prediket *Cumlaude*.